

LAPORAN ABDIMAS
SOSIALISASI PERAN INTERMEDIARY INSURANCE
DALAM PENANGANAN ASET DAN PENGADAAN
BARANG/JASA
DI BMN (BARANAHAN) KEMHAN

DISUSUN OLEH
DR. IR. DEDY DEWANTO, MM, ACII
(DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS)



JAKARTA, AGUSTUS 2021

**Halaman Pengesahan Proposal / Laporan Akhir
Program Pengabdian Masyarakat
Universitas Esa Unggul**

1. Judul Kegiatan Abdimas : Sosialisasi Peran Intermediary Insurance dalam Penanganan Aset dan Pengadaan Barang/Jasa
2. Nama mitra sasaran (1) : BMN (Baranahan) Kementerian Pertahanan
3. Anggota Tenaga Ahli :
 - a. Nama : Dr. Ir. Dedy Dewanto, MM, ACII
 - b. NIDN : 0309126701
 - c. Jabatan Fungsional : Dosen Tetap
 - d. Fakultas / Prodi : Ekonomi /Manajemen & Akuntansi
 - e. Bidang keahlian : Manajemen Stratejik, Asuransi
 - f. Telepon : 0811172840
 - g. Email : dedy.dewanto@esaunggul.ac.id
4. Jumlah Anggota Dosen : -
5. Jumlah Anggota Mahasiswa : -
6. Lokasi kegiatan mitra (1) : BMN (Baranahan) Kementerian Pertahanan
Alamat : Jl. Tanah Abang Timur No 6-7 RT 3/RW 3, Gambir. Kecamatan Gambir
Kabupaten/Kota : Jakarta Pusat
Propinsi : DKI Jakarta 10110
7. Periode/waktu kegiatan : 20 Mei 2021 – 16 Agustus 2021
8. Luaran yang dihasilkan : Benefit penggunaan Intermediary Insurance, Manfaat bagi BMN (Baranahan) Kemhan, Usulan Tindak Lanjut
9. Usulan / Realisasi Anggaran : N/A
 - a. Dana Internal UEU : -
 - b. - Sumber dana lain (1) : -

Jakarta, 16.08.2021

Menyetujui
Dekan Fakultas



**Universitas
Esa Unggul**
Fakultas ekonomi dan bisnis

(Dr. Tantri Yanuar Rahmat Syah, SE, MSM)
NIDN 0310018004

Pengusul,
Anggota Tim Ahli

(Dr. Ir. Dedy Dewanto, MM, ACII)
NIDN 0309126701

Mengetahui,
Ka. LPPM



**Universitas
Esa Unggul**
LPPM

Dr. Erry Yudhya Mulyani, S Gz, Msc
NIK. 209100388

RINGKASAN

Salah satu tugas pengabdian masyarakat adalah melakukan sosialisasi pada institusi yang terdapat dalam masyarakat. Penulisan Abdimas ini didasarkan pada Sosialisasi peran Intermediary Asuransi pada BMN (Baranahan) di Kementerian Pertahanan.

Dalam proses pengadaan Asuransi untuk penanganan Aset, maupun terkait proses pengadaan Barang/Jasa di berbagai Institusi termasuk Kementerian/BUMN telah mengikuti standar Peraturan dan Perundangan yang ada, diantaranya: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 2000 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah; Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Beberapa ketentuan terkait Asuransi antara lain: dalam pelaksanaan tender dipersyaratkan adanya jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan (disini disebutkan jaminan dapat berupa bank garansi atau surety bond); persyaratan Barang Impor yang mendapatkan fasilitas bebas Bea/Cukai harus dilindungi dengan Custom Bond; Persyaratan Barang Impor yang masuk harus dilengkapi dengan asuransi pengangkutan pada waktu pengecekan oleh kepabeanan; Persyaratan adanya asuransi pengangkutan untuk barang yang akan dikirim ke daerah-daerah; dan berbagai persyaratan penutupan produk asuransi lainnya terkait pengadaan barang dan jasa seperti, asuransi kecelakaan diri terhadap pekerja dalam pelaksanaan proyek pengadaan, asuransi CAR/EAR bila barang harus dibuat atau direkayasa terlebih dahulu, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi didapati bahwa pengadaan Asuransi tersebut kebanyakan dilaksanakan oleh Pelaksana Pengadaan (Pemenang Tender) sendiri, sehingga bila terjadi resiko seperti: barang rusak selama pengangkutan, kapal pengangkut tenggelam, rekayasa suatu produk barang tidak berhasil, maka klaim Asuransi nya harus dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan (Pemenang Tender) sendiri tanpa bantuan pihak yang ahli di bidang Perasuransian. Demikian pula terkait dengan persyaratan Jaminan Penawaran, Pelaksanaan, Uang Muka dan Pemeliharaan, maka Pihak Pemberi Kerja hanya menerima Bank Garansi atau Surety Bond yang diurus oleh Pelaksana Pengadaan, sehingga dalam hal terjadi wan prestasi maka Pihak Pemberi Kerja tidak mendapatkan bantuan dari pihak ahli di bidang Asuransi dalam

hal ini Intermediary Asuransi untuk dapat mengajukan klaim dan memperoleh pembayaran klaim. Hal yang sama dalam penutupan Asuransi Aset belum menggunakan tenaga ahli Asuransi seperti Intermediary Asuransi. Walaupun existing practice sesuai standar dan kewajaran, namun akan lebih baik lagi menggunakan Intermediary Asuransi. Sosialisasi pentingnya Intermediary Asuransi ini adalah suatu bentuk sosialisasi masyarakat dalam hal ini Kemhan akan pentingnya peran Intermediary Asuransi dengan berbagai Nilai Tambah (*Added Value*) yang diberikan.

KATA PENGANTAR

Dengan ini mengucapkan syukur kepada Allah SWT, tim telah menyelesaikan penulisan Laporan Abdimas berjudul:

SOSIALISASI PERAN INTERMEDIARY INSURANCE DALAM PENANGANAN ASET DAN PENGADAAN BARANG/JASA DI BMN (BARANAHAN) KEMHAN

Penulisan Laporan Abdimas ini merupakan sosialisasi peran Intermediary Asuransi dalam penanganan aset dan proses Pengadaan barang/Jasa di BMN (Baranahan) Kemhan. Sosialisasi ini ditujukan untuk memberikan Nilai Tambah (Added Value) dalam Penanganan Aset dan proses Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BMN (Baranahan) Kemhan, sehingga diharapkan dapat memperlancar dan mensukseskan penanganan aset dan proses pengadaan barang/jasa yang lebih baik ke depan. Pada bagian akhir dibuat kesimpulan dan saran untuk kelanjutan ke depan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Sekjen Kementerian Pertahanan
2. Kepala Pusat BMN Baranahan
3. Para Kabid Bidang 1, 2 dan 3 BMN Baranahan
4. Rekan – rekan lain, yang tak mungkin kami sebutkan satu persatu.

Akhir kata semoga penulisan ini memberikan manfaat utamanya bagi penulis dan bagi sekalian pembaca. Yang mana harapannya dapat memberikan masukan yang berharga bagi penyusunan penanganan aset dan proses pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BMN (Baranahan) Kemhan ke depan, sehingga pencapaian kinerja penanganan aset dan pengadaan barang/jasa akan berjalan lebih lancar dan sukses. Aamiin YRA.

Jakarta, Agustus 2021

Dr.Ir.Dedy Dewanto, MM, ACII
Konsultan Ahli

DAFTAR ISI

	Halaman
Ringkasan	1
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Daftar Tabel	5
Daftar Gambar	6
Bab I. PENDAHULUAN	7
Bab II. TARGET DAN LUARAN	
A. Tujuan Penulisan	9
B. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah	9
C. Target dan Luaran yang dihasilkan	9
Bab III. METODE PELAKSANAAN	
A. Kerangka Berpikir Penyusunan Kajian Peranan Intermediary Asuransi.....	10
B. Kerangka Analisis dan Pokok-pokok Pembahasan	10
C. Metode Pengumpulan Data	11
D. Informasi yang dibutuhkan	12
E. Sistematika Penulisan	12
F. Waktu Penulisan	13
Bab IV. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI	
A. Kinerja LPPM –UEU	14
B. Kepakaran Pengusul	14
BAB V. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	
A. Permasalahan	16
B. Benefit penggunaan Intermediary Asuransi	17
C. Manfaat bagi BMN (Baranahan) Kemhan	17
C. Usulan Tindak Lanjut	18
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	19
DAFTAR PUSTAKA	20

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1	Metode Pengumpulan Data	11
-----------	-------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Model Kerangka Berpikir 10

Gambar 3.2 Kerangka Analisis 10

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan asuransi sangat penting dalam pembangunan di berbagai bidang khususnya sektor riil, karena fungsi asuransi adalah *risk transfer mechanism* (mekanisme transfer resiko), dimana resiko-resiko yang dihadapi oleh kontraktor jalan, jembatan, mining ; pemilik pabrik/industri; pemilik hotel/gedung , dan sebagainya, akan dipindahkan ke perusahaan asuransi. Sehingga suatu waktu terjadi *sudden and unforeseen damage* (kejadian tiba-tiba dan tidak terduga yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan) dikarenakan oleh banjir, kebakaran, gempa bumi, erupsi vulkanik dan lain sebagainya, maka Tertanggung (pemilik Polis) tidak perlu khawatir, karena akan dijamin oleh perusahaan Asuransi. Sehingga benefit dari asuransi adalah : ketenangan pikiran dan hati (*peace of mind*); kendali kerugian (*loss control*); keuntungan sosial (*social benefit*) karena orang-orang tetap bekerja setelah terjadinya suatu musibah, kebakaran pabrik misalnya ; investasi (*investment of fund*) dimana perusahaan asuransi dengan adanya gap antara penerimaan premi dan suatu klaim, akan melakukan investasi baik pada sektor keuangan, jasa atau membantu industri lainnya. Jadi asuransi juga ikut aktif berpartisipasi dalam pembangunan industri lainnya.

B. Peranan Asuransi dalam Pengadaan Barang/Jasa

Peranan Asuransi dalam Pengadaan Barang/Jasa antara lain sebagai berikut:

- Sebagai jaminan bagi Pemilik Proyek dalam hal terjadi wan prestasi oleh Pelaksana Pengadaan (Pemenang Tender), melalui persyaratan pembuatan jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan (disini disebutkan jaminan dapat berupa bank garansi atau surety bond);
- Jaminan Custom Bond terhadap Barang Impor yang mendapatkan fasilitas bebas Bea/Cukai;
- Sebagai mekanisme transfer resiko melalui Asuransi Pengangkutan, bila pengadaan barang harus dikirim ke daerah-daerah melalui pengangkutan darat/laut/udara.
- Dan berbagai mekanisme transfer resiko ke perusahaan Asuransi melalui persyaratan penutupan produk asuransi lainnya seperti, asuransi kecelakaan diri terhadap pekerja dalam

pelaksanaan proyek pengadaan, asuransi CAR/EAR bila barang harus dibuat atau direkayasa terlebih dahulu, dan lain sebagainya.

C. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang diamati Penulis, terangkum sebagai berikut:

- Penutupan Asuransi untuk Penanganan Aset dilakukan langsung kepada pihak Asuransi.
- Pembuatan Jaminan Bank Garansi/Surety Bond kebanyakan dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan.
- Pembuatan Asuransi antara lain: Asuransi pengangkutan, kecelakaan diri, CAR/EAR, kendaraan bermotor dan lainnya, kebanyakan dilakukan sendiri oleh Pelaksana Pengadaan.
- Sehingga apabila terjadi suatu wan prestasi Jaminan oleh pelaksana Pengadaan dan/atau terjadinya suatu peristiwa/accident (misalnya kapal tenggelam dalam asuransi pengangkutan) yang menimbulkan klaim Asuransi bagi Pemilik Proyek, maka Pemilik Proyek akan menuntut tanggung jawab dan ganti rugi kepada Pelaksana Pengadaan. Dalam hal ini Pemilik Proyek tidak memiliki bantuan tenaga ahli dalam penanganan klaim wan prestasi Jaminan maupun klaim Asuransi agar klaimnya terbayarkan dan sesuai dengan nilai tuntutan klaim.
- Demikian pula Pelaksana Pengadaan dalam penutupan produk Asuransi tidak memiliki bantuan tenaga ahli, sehingga dalam hal terjadinya peristiwa/accident yang menimbulkan klaim Asuransi, tidak memiliki bargaining position yang kuat terhadap perusahaan Asuransi dalam hal liability Polis dan Adjustment Polis.
- Juga dalam hal terjadinya peristiwa/accident yang menimbulkan klaim Asuransi Aset maka Pemilik tidak memiliki tenaga ahli Asuransi untuk penanganan klaim.
- Sehingga potensi resiko tidak terbayarnya maupun kurangnya bargaining klaim asuransi aset, klaim wan prestasi Jaminan dan klaim Asuransi dalam hal ini belum dimitigasi.

BAB II TARGET DAN LUARAN

A. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melakukan kajian terhadap Peran Intermediary Asuransi dalam penanganan aset dan proses pengadaan barang/Jasa di BMN (Baranahan) Kemhan, meliputi benefit penggunaan Intermediary Asuransi dan Manfaat bagi BMN Baranahan Kemhan khususnya, untuk kemudian berdasarkan hasil kajian diajukan usulan langkah-langkah tindak lanjut.

B. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Penulisan ini membatasi masalah dalam rangka melakukan kajian Peran Intermediary Asuransi dalam penanganan aset dan proses pengadaan barang/Jasa di BMN (Baranahan) Kemhan, meliputi benefit penggunaan Intermediary Asuransi dan Manfaat bagi BMN Baranahan Kemhan khususnya, untuk kemudian diusulkan langkah-langkah tindak lanjut.

C. Target dan Luaran yang dihasilkan

Penulisan ini dalam rangka penyusunan kajian Peran Intermediary Asuransi dalam penanganan aset dan proses pengadaan barang/Jasa di BMN (Baranahan) Kemhan, yang mana akan menghasilkan luaran-luaran output sebagai berikut:

- i. Benefit Penggunaan Intermediary Asuransi
- ii. Manfaat bagi Kemhan
- iii. Usulan tindak lanjut

BAB III METODE PELAKSANAAN

A. Kerangka Berpikir Penyusunan Kajian Peranan Intermediary Asuransi

Suatu model bisnis adalah metode perusahaan dalam menciptakan penghasilan di dalam lingkungan bisnis sekarang (Wheelen & Hunger, 2006). Oleh karenanya untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis Asuransi Kerugian, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- Memahami proses bisnis Penanganan Aset dan Pengadaan barang/Jasa
- Memahami proses bisnis Asuransi Kerugian
- Memahami Permasalahan dan Peran Intermediary Asuransi
- Memberikan Saran perbaikan proses ke depan

Sehingga pembahasan diatas dapat dituangkan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 3.1. Model Kerangka Berpikir

B. Kerangka Analisis dan Pokok-pokok Pembahasan

Pembuatan kerangka analisis adalah mengikuti Model Kerangka Berpikir yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

- I. Proses Bisnis Penanganan Aset dan Pengadaan Barang/Jasa
- II. Proses Bisnis Asuransi
- III. Permasalahan dan Peran Intermediary Asuransi
- IV. Saran Perbaikan Proses



Gambar 3.2. Kerangka Analisis

C. Metode Pengumpulan Data

No.	Tahapan Analisis	Data dan info yang dibutuhkan	Sumber data	Cara pengumpulan data
1.	Analisis Penanganan Aset dan Proses Pengadaan Barang/Jasa	Data proses bisnis	Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018, Keppres Nomor 18 tahun 2000, UU no 18 tahun 1999	Secara periodik mengumpulkan sumber data yang relevan dan juga melakukan diskusi dengan nara sumber berkompeten sesuai kebutuhan.
2.	Analisis Proses Bisnis Asuransi	Data proses bisnis	UU no 40 tahun 2014, UU no 2 tahun 1992, PP nomor 73 tahun 1992, dll.	Secara periodik mengumpulkan sumber data yang relevan dan juga melakukan diskusi dengan nara sumber berkompeten sesuai kebutuhan.
2.	Analisis Kinerja industri Asuransi Kerugian	Data Premi Direct Business dan Modal Sendiri/Equity	Data dari Laporan Perasuransian tahun 2020	Mendapatkan data dari OJK, Kemenkeu & AAUI dan melakukan diskusi
2.	Analisis Permasalahan & Kendala	Profile model existing, masalah kendala di lapangan Klaim, bisnis Potret dan di	Data dari Laporan Perasuransian tahun 2020	Memperoleh data dan melakukan diskusi.

Tabel 3.1. Metode pengumpulan data

Data yang diperlukan untuk penulisan ini didapat dari :

- Data primer yang diperoleh dengan data-data langsung dari Kemhan.
- Data primer yang diperoleh dengan data-data langsung dari OJK, Kementerian Keuangan
- Data primer dari AAUI dan pelaku industri dan lain-lainnya

- Data sekunder, yang diperoleh dari objek penulisan, literatur, buku, koran, majalah, internet, dan hasil penelitian terkait untuk mendapatkan informasi tentang Perusahaan dan Industrinya.

D. Informasi yang Dibutuhkan

Informasi yang dibutuhkan untuk penulisan ini adalah data-data primer dan data-data sekunder, yang berkaitan dengan penyusunan Kajian Peran Intermediary Asuransi Dalam Penanganan Aset dan Proses Pengadaan Barang/Jasa di BMN (Baranahan) Kemhan.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan disusun dalam kerangka sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memberikan gambaran umum tentang penulisan, yang terdiri dari beberapa sub-bab yang menguraikan Latar Belakang, Peranan Asuransi dalam pengadaan Barang/Jasa, dan Permasalahan.

BAB II PERATURAN, POTRET DAN PRAKTEK ASURANSI

Bab ini menguraikan beberapa hal antara lain:

- A. Peraturan Industri Asuransi Kerugian
- B. Pemain Asuransi Kerugian di Indonesia
- C. Potret Industri Asuransi Kerugian
- D. Potret Underwriting Asuransi
- E. Tipikal Klien

BAB III BENEFIT INTERMEDIARY ASURANSI & USULAN TINDAK LANJUT

Bab ini menjelaskan beberapa hal:

- A. Permasalahan
- B. Benefit penggunaan Intermediary Asuransi
- C. Manfaat bagi BMN (Baranahan) Kemhan
- D. Usulan Tindak Lanjut

BAB IV KESIMPULAN

F. Waktu Penulisan

Waktu penulisan sekitar 2 bulan, tempat dilakukan penulisan sosialisasi/konsultasi di Jakarta di Baranahan, Kementerian Pertahanan, Jl. Tanah Abang Timur No 6-7, RT 3/RW 3, Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, 10110, dan yang paling banyak di kantor penulis dengan menggunakan ruang kantor, alat tulis, komputer, overhead projector serta buku-buku dan laporan-laporan dari berbagai sumber.

BAB IV KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

A. Kinerja LPPM – UEU

Universitas Esa Unggul memiliki sebuah lembaga yang mewadahi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). LPPM Universitas Esa Unggul di bentuk tahun 1994 dan dikukuhkan pada tanggal 01 Oktober 1998 berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Kemala No. 041/KYK/SK/X/1998. LPPM memiliki peranan untuk mengkoordinasikan kegiatan penelitian, mengusahakan dan mengendalikan sumber daya penelitian dan mengkoordinasikan, memantau, menilai dan mendokumentasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Seluruh kegiatan LPPM Universitas Esa Unggul didukung oleh para peneliti, dengan kualifikasi Doktor dan Master dari berbagai disiplin ilmu pada Program Studi Universitas Esa Unggul. LPPM UEU juga bekerjasama dengan Pusat Studi di lingkungan Universitas Esa Unggul, dan beberapa pusat kegiatan seperti:

1. Pusat Pengelola dan Penerbitan Publikasi Ilmiah.
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Wilayah Pemukiman dan Perkotaan.
3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Informasi.
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa dan Kebudayaan.
5. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan.
6. Pusat Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan UKM.
7. Pusat Penelitian dan Pengembangan Psikologi Terapan.
8. Pusat Penelitian dan Pengembangan Studi Wanita.
9. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
10. Pusat Penelitian dan Pengembangan Desain Industri.
11. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
12. Pusat Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM.

B. KEPAKARAN PENGUSUL

Penjelasan tentang bidang kepakaran dan portofolio Dosen, meliputi antara lain:

1. Manajemen Strategik, memiliki gelar Doktoral dibidang ini, termasuk didalamnya: analisa lingkungan bisnis eksternal, peluang dan ancaman, analisa lingkungan bisnis internal,

kekuatan dan kelemahan, analisa 5's Porter Industry Analysis, Visi, Misi, Budaya, Nilai, Strategi Bisnis, Rencana Jangka Menengah dan Jangka Panjang, Kebijakan, Program, Anggaran, Prosedur, Struktur Organisasi, dan lain-lainnya.

2. Ahli Asuransi, memiliki gelar Ahli Asuransi Dunia (ACII) di bidang ini, meliputi Asuransi Jiwa, Asuransi Kerugian, Asuransi Sosial, Asuransi Kesehatan, dan Asuransi Tenaga Kerja, Reasuransi dan lain-lainnya
3. Merupakan Nara Sumber dan Tenaga Ahli Kementrian dan BUMN/Swasta.

BAB V HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang diamati Penulis, terangkum sebagai berikut:

- Penutupan Asuransi untuk Penanganan Aset dilakukan langsung kepada pihak Asuransi.
- Pembuatan Jaminan Bank Garansi/Surety Bond kebanyakan dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan.
- Pembuatan Asuransi antara lain: Asuransi pengangkutan, kecelakaan diri, CAR/EAR, kendaraan bermotor dan lainnya, kebanyakan dilakukan sendiri oleh Pelaksana Pengadaan.
- Sehingga apabila terjadi suatu wan prestasi Jaminan oleh pelaksana Pengadaan dan/atau terjadinya suatu peristiwa/accident (misalnya kapal tenggelam dalam asuransi pengangkutan) yang menimbulkan klaim Asuransi bagi Pemilik Proyek, maka Pemilik Proyek akan menuntut tanggung jawab dan ganti rugi kepada Pelaksana Pengadaan. Dalam hal ini Pemilik Proyek tidak memiliki bantuan tenaga ahli dalam penanganan klaim wan prestasi Jaminan maupun klaim Asuransi agar klaimnya terbayarkan dan sesuai dengan nilai tuntutan klaim.
- Demikian pula Pelaksana Pengadaan dalam penutupan produk Asuransi tidak memiliki bantuan tenaga ahli, sehingga dalam hal terjadinya peristiwa/accident yang menimbulkan klaim Asuransi, tidak memiliki bargaining position yang kuat terhadap perusahaan Asuransi dalam hal liability Polis dan Adjustment Polis.
- Juga dalam hal terjadinya peristiwa/accident yang menimbulkan klaim Asuransi Aset maka Pemilik tidak memiliki tenaga ahli Asuransi untuk penanganan klaim.
- Sehingga potensi resiko tidak terbayarnya maupun kurangnya bargaining dalam klaim asuransi aset, klaim wan prestasi Jaminan dan klaim Asuransi dalam hal ini belum dimitigasi.

B. Benefit penggunaan Intermediary Asuransi

Beberapa benefit penggunaan Intermediary Asuransi, dapat dirangkum sebagai berikut:

- Memiliki tenaga pemasar professional yang berlatar belakang teknik.
- Memberikan pelayanan baik dalam hal akseptasi maupun klaim (memberikan saran/pendapat dan bantuan)
- Proses penerbitan polis cepat karena memiliki jaringan hubungan dengan berbagai perusahaan Asuransi yang dapat dipadukan dalam Co-Insurance atau Reasuransi
- Harga kompetitif karena memiliki hubungan dengan berbagai perusahaan Asuransi untuk dilakukan benchmarking.
- Memiliki tenaga ahli asuransi bersertifikasi yang akan berperan sebagai lead Underwriter, bagi beberapa perusahaan asuransi dan reasuransi. Hal ini bila pengurus memiliki keahlian tersebut, maka akan sangat mendukung bagi perolehan dukungan dari berbagai perusahaan Asuransi/Reasuransi
- Untuk melakukan pelayanan akseptasi yang cepat pada resiko dengan nilai Sum Insured tinggi maka akan mengembangkan program Fakultatif Semi Automatic Obligatory, dengan membentuk profile customer →melibatkan panel yang terdiri dari beberapa perusahaan asuransi dan reasuransi yang terpercaya.
- Bisnis model yang menggunakan keputusan underwriting yang cepat didasarkan pada data obyek resiko lengkap plus data hasil survey yang lengkap (termasuk additional questions yang harus di jawab)
- Sehingga terbentuk suatu kapasitas Underwriting yang besar dan dapat menerbitkan polis dalam waktu singkat.
- Demikian pula dalam hal pelayanan klaim, dengan pemberlakuan Follow the Leader dengan menunjuk lead Insurance, sehingga pelayanan klaim dapat terwujud dengan baik dan tepat waktu.

C. Manfaat bagi BMN (Baranahan) Kemhan

Beberapa manfaat bagi BMN (Baranahan) Kemhan, dapat dirangkum sebagai berikut:

- Proses risk transfer mechanism kepada perusahaan asuransi yang terprogram dengan baik (cepat dan prudent), disertai pelayanan klaim

- Terbentuknya peace of mind (rasa aman) bagi segenap manajemen dan pegawai dalam menjalankan bisnis
- Jaminan kelancaran dalam pembangunan proyek dan bisnis-bisnis lainnya bagi Kemhan

D. Usulan Tindak Lanjut

Agar semua proses pengadaan Asuransi untuk penanganan aset maupun proses pengadaan barang/jasa menggunakan Jasa Intermediary Asuransi yang bonafid dan Terpercaya, namun dibutuhkan suatu usulan anggaran kepada pihak Kementerian Keuangan dalam pelaksanaannya. Untuk pemilihan Intermediary Asuransi yang akan digunakan, beberapa kriteria paramater yang dapat digunakan sebagai berikut:

- Memiliki Tenaga Ahli bersertifikasi AAIK, ACII atau yang setara/sederajat
- Memiliki Tenaga Ahli dengan pengalaman kerja di bidang Asuransi minimal 20 tahun.
- Memiliki hubungan dengan berbagai perusahaan Asuransi yang bonafid dan terpercaya
- Memiliki hubungan dengan berbagai perusahaan Reasuransi yang bonafida dan terpercaya.
- Memiliki pengalaman baik dibidang Akseptasi dan Klaim pada Institusi yang memiliki skala besar.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hal – hal yang diuraikan pada bab – bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Walaupun existing practice sesuai standar dan kewajiban, namun akan lebih baik lagi menggunakan Intermediary Asuransi.
2. Dari sosialisasi Peranan Intermediary Asuransi diperoleh tanggapan positif, namun dalam prakteknya belum masuk dalam mata anggaran, sehingga perlu menjadi usulan kepada Kementerian Keuangan.
3. Limitasi dan Saran Penelitian Lanjut

Kajian sosialisasi ini memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan pertama adalah kajian hanya didasarkan pada sosialisasi di BMN (Baranahan) Kemhan, dimana terdapat berbagai Badan lain di Kemhan, untuk itu lingkup kajian perlu diperluas. Batasan kedua adalah apakah hasil kajian sosialisasi berlaku untuk bidang lain selain Kemhan. Sehingga kajian sosialisasi perlu dilakukan pada Institusi lainnya baik Kementerian, Lembaga, BUMN, BUMD dan lain sebagainya. Keterbatasan ketiga adalah perlunya perluasan hasil kajian sosialisasi, terhadap pemahaman Isi Polis bagi PIC dalam pelaksanaan Akseptasi maupun Klaim pada Pihak Tertanggung, sehingga diharapkan menjadi partner internal yang ideal dalam penanganan Asuransi dalam kerjasama dengan pihak luar yang memiliki keahlian Asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Barney, J (1991). "Firm Resources a Sustained Competitive Advantage". *Journal of Management*, 17, pp.99-120
- Biro Perasuransian, Bapepam LK. Perasuransian Indonesia 2017.
- Brown, T (1977). "The Essence of Strategy". *Management Review*, pp.8-13
- Carves, RE and Ghemawat, P (1992). " Identifying Mobility Barriers". *Strategic Management Journal*, pp.1-12
- Caves, RE and Porter, Michael E (1977). "From Entry Barriers to Mobility Barriers : Conjectural Decisions and Contrieved Deterrence to New Competition". *The Quartely Journal of Economics*, Vol.91, No.2, pp.241-262.
- Coulter, Mary (2002). *Strategic Management in Action* , 2nd ed., Prentice Hall New Jersey.
- DeCastro, JO and Chrisman, J.J.(1988). " Narrow-Scope Strategies and Firm Performance : An Empirical Investigation." *Journal of Business Strategies*, pp.1-16
- Dickson, G.C.A(1993). *Risk and Insurance*. , Book Production Consultants, Cambridge, UK.
- Djohanputro, Bramantyo (2008). Prinsip-prinsip Ekonomi Makro. Edisi 10. Penerbit PPM, Jakarta.
- Fiegenbaum, et.al (2001). "Linking Hypercompetition and Strategic Group Theories : Strategic Manuevering in the US Insurance Industry". *Managerial and Decision Economics*, Vol.22, No.4/5, pp.265-279.
- Gitman, Lawrence J. *Principles of Managerial Finance*. 11th .ed. Boston : Pearson Education, Inc., 2006.
- Horngren, Charles T., Gary L. Sundem dan William O. Stratton. *Introduction to Management Accounting*. 13th.ed. Upper Saddle River, New Jersey : Prentice Hall , 2005.
- Indonesia Legal Center Publishing (2007). Peraturan Perundang-undangan Asuransi Indonesia. CV Karya Gemilang, Jakarta
- Hofer, C.W. and Schendel, D.(1978). *Strategy Formulation : Analytical Concept*. St Paul : West Publishing Co., p.77

- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. *Marketing Management*. 12th.ed. Upper Saddle River, New Jersey : Prentice Hall, 2006
- Kuncoro, Mudrajad (2005). *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Penerbit Erlangga, Jakarta
- Nordhaus, Samuelson. *Economics*. 18th.ed. New York : McGraw- Hill , 2005
- Pitts, Robert A and Lei, David (2000). *Strategic Management : Building Competitive Advantage*. South-Western College Publishing.
- Porter, Michael E (1991). "Towards a Dynamic Theory of Strategy". *Strategic Management Journal*, Vol.12, Special Issue : Fundamental Research Issues in Strategic and Economic, pp.95-117
- Porter, Michael E (1981). " The Contributions of Industrial Organization to Strategic Management." *The Academy of Management Review*, Vol.6, No.4, pp.609-620
- Porter, Michael E (1980). *Competitive Strategy : The Technique for Analyzing Industries and Competitors*. New York : The Free Press.
- Porter, Michael E (1985). *The Competitive Advantage of Nations, creating and sustaining superior performance*. New York : The Free Press.
- Porter , Michael E (1983). "Industrial Organization and the Evolution of Concepts for Strategic Planning : The New Learning". *Managerial and Decision Economics*, Vol.4, No.3, pp.172-180.
- Porter, Michael E (1979). "The Structure within Industries and Companies' Performance". *The Review of Economic and Statistics*, Vol 61, No.2, pp.214-227.
- Porter, Michael E (1980). "Industry Structure and Competitive Strategy : Keys to Profitability." *Financial Analyst Journal*, Vol 36, No.4, pp.30-41.
- Porter, Robert H (1994). "Recent Developments in Empirical Industrial Organization." *The Journal of Economic Education*, Vol 25, No.2, pp.149-161.
- Prihadi, Toto. *Mudah Memahami Laporan Keuangan*. Jakarta, 2008
- Rosenberg, Moses K (1977). "Historical Perspective of the Development of Rate Regulation of Title Insurance". *The Journal of Risk and Insurance*, Vol.44, No.2, pp.193-209.
- Sianipar, J.T., dan Jan Pinontoan. *Surety Bond sebagai alternative dari Bank Garansi*. Jakarta: CV Dharmaputra, 2003
- Stearns, TM et.al. (1995). "New Firm Survival : Industry, Strategy, and Location". *Journal of Business Venturing*, pp.23-42.

Tunggal, Arif Djohan (1998). Peraturan Perundang-undangan Perasuransian di Indonesia tahun 1992-1997. Harvarindo, Jakarta.

Wheelen, TL and Hunger, J. David (2006). *Strategic Management and Business Policy*. 10th.ed. : Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U

Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U